**Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP)**
https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp
ISSN: 2775-0590 (*online*) ISSN: 2665-3856 (*Print*)
Vol. 7 No. 2 2025
Hal. 109 - 115

# ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DESA PESISIR TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

**Rouli Margareta Silaban[1*], Taryono[2], Fadil Rafita[3], Imelda Triani[4], Nasywa Zulfita[5], Yemima Elia[6], Yubel Rodiansyah[7]**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Jl. HR. Soebrantas KM 12,5, Kota Pekanbaru [1,2,3,4,5,6,7]
rouli.margareta2365@student.unri.ac.id[*]

***Abstract***

*The Village Development Index (IDM) is used as an official tool to measure the progress of village development in Indonesia. However, the high achievements of IDM are not always consistent with the principles of sustainable development adopted by the Village Sustainable Development Goals (SDGs). This study aims to analyze the relationship between sustainable development of coastal villages and IDM in Pulau Burung, Indragiri Hilir regency, by 2024. The research method uses a quantitative descriptive approach with secondary data obtained from the Ministry of Villages, Dsisadvantaged Areas and Migration (Kemendesa PDTT). The results show that two villages have Independent status and one village has Developing status, but the sustainability indicators, especially those related to environmental aspects and disaster prevention, are still low. This finding is consistent with the study by Taryono (2024) which showed the gap between the achievements of IDM and village SDGs in the coastal region of Bengkalis. This study recommends synchronization of IDM and village SDG policies to ensure true sustainable development.*

***Keywords:*** *Sustainable development, coastal village, IDM, Village Sustainable Development Goals, Burung Island*

**Abstrak**

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan sebagai instrumen resmi untuk mengukur kemajuan pembangunan desa di Indonesia. Namun, capaian IDM yang tinggi tidak selalu selaras dengan prinsip pembangunan berlanjutan yang diadopsi melalui Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan pembangunan berlanjutan desa pesisir terhadap IDM di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Desa, PDTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua desa berada pada status Mandiri dan satu desa pada status Berkembang, namun indikator keberlanjutan, terutama terkait aspek lingkungan dan kesiapsiagaan bencana, masih rendah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Taryono (2024) yang menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian IDM dan SDGs Desa di wilayah pesisir Bengkalis. Penelitian ini merekomendasikan sinkronisasi antara kebijakan IDM dan SDGs Desa agar pembangunan benar-benar berkelanjutan.

**Kata kunci**: pembangunan berlanjutan, desa pesisir, IDM, SDGs Desa, Pulau Burung

## PENDAHULUAN

Membantu meningkatkan kualitas pembangunan nasional sangat penting bagi desa, yang merupakan entitas pemerintah dengan lingkup mikro. Menurut uandang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengembangan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakatnya. Namun, perkembangan desa adalah tugas yang sulit, dan banyak desa masih memerlukan perhatian khusus untuk berkembang dengan baik. Oleh karena itu diperlukan tindakan strategis, salah satunya adalah dengan mengukur capaian IDM. Langkah ini dapat membantu prangkat desa menyamakan presepsi dan menetapkan tujuan pembangunan yang lebih jelas. (Mangara & Syaifudin, 2022).

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa bukan hanya objek, melainkan juga subjek pembangunan yang memeiliki kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber daya yang ada. Untuk mengukur capaian pembangunan desa, pemerintah menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan (Kementerian Desa PDTT, 2016). Pada dasarnya, indeks ini berfungsi sebagai alat penting untuk mengevaluasi tingkat kemandirian dan arah pembangunan desa. Namun, pembangunan desa tidak dapat dilakukan tanpa partisispasi masyarakat, yang merupakan komponen penting dari keberhasilan pembangunan lokal.

Elena et al. (2020) menegaskan bahwa participatory rural appraisal berperan penting untuk mengoptimalkan pembangunan desa karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Dengan partisipasi yang kuat, capaian pembangunan melalui IDM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa secara nyata.

Di sisi lain, pembangunan desa di Indonesia diarahkan untuk mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang mencakup 18 tujuan. SDGs Desa berfungsi sebagai peta jalan pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kementerian Desa PDTT, 2016). Integrasi antara IDM dan SDGs Desa menjadi strategi penting agar pembangunan tidak hanya fokus pada indikator makro, tetapi juga memperhatikan kualitas keberlanjutan di tingkat lokal.

Permasalahan yang muncul adalah capaian IDM yang tinggi tidak selalu menjamin pencapaian indikator SDGs Desa secara menyeluruh. Taryono (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Bengkalis menemukan bahwa meskipun terdapat desa dengan status Mandiri menurut IDM, beberapa indikator SDGs, khususnya pendidikan, lingkungan, dan kesiapsiagaan bencana, masih tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara prinsip pembangunan berkelanjutan dan pencapaian makro pembangunan desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penilaian pembangunan desa tidak cukup hanya dinilai dari status IDM, tetapi harus dilihat lebih jauh dari kualitas keberlanjutan di lapangan.

Keberlangsungan kehidupan desa khususnya di desa pesisir, sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu global. Wilayah pesisir adalah yang paling rentan karena efeknya sulit diprediksi dan berdampak besar pada kondisi alam dan sosial. Kerusakan lingkungan, baik akibat faktor alami maupun aktivitas manusia, dapat memperparah dampak terhadap perubahan iklim. Di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan pembangunan yang pesat, fenomena seperti abrasi pantai, degradasi garis pantai, konflik pemanfaatan lahan, dan kerusakan fisik habitat pesisir sering terjadi (Fallahiyah et al., 2023)

Selain itu, kondisi geografis wilayah pesisir Indonesia yang umumnya berupa dataran rendah semakin memperbesar kerentanan terhadap perubahan iklim. Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG menyatakan bahwa dataran rendah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat rentan terhadap banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah (Sembiring et al., 2025). Hal ini juga terjadi di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan wilayah pesisir yang rawan banjir dan abrasi. Kondisi ini menuntut adanya pembangunan desa yang tidak hanya mengejar capaian IDM, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan desa di kawasan ini tidak cukup hanya mengejar capaian IDM, tetapi juga harus memastikan adanya keberlanjutan lingkungan dan sosial yang mendukung ketahanan jangka panjang.

Lebih jauh lagi, perubahan iklim, deforestasi, tata ruang yang buruk, dan sistem drainase yang tidak memadai adalah semua faktor yang menyebabkan peningkatan tingkat banjir yang sering terjadi selama musim hujan, yang meningkatkan tantangan untuk membangun desa pesisir. Keberhasilan pembangunan desa dipengaruhi oleh peran pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai jika orang-orang terlibat dalam proses perencanaan dan penentuan program prioritas (Sembel et al., 2017). Dengan partisipasi ini, pembangunan desa benar-benar menjadi pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, sehingga mampu menjawab tantangan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Berdasarkan pemaparan kesenjangan dan urgensi masalah tersebut, khususnya di wilayah pesisir yang rentan seperti Kecamatan Pulau Burung, maka penelitian ini memiliki fokus yang spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan pembangunan berkelanjutan desa pesisir terhadap capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2024.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif, menurut Creswell (2014), adalah pendekatan untuk menguji teori-teori objektif dengan meneliti hubungan antar variabel, di mana data numerik dianalisis menggunakan prosedur statistik. Pendekatan ini dikombinasikan dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Gabungan pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menyajikan dan menganalisis data numerik secara rinci guna menggambarkan paradoks pembangunan antara capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Penelitian ini dilaksanakan pada periode Agustus hingga Oktober 2025, dengan menggunakan data capaian pembangunan desa dari tahun 2024. Subjek penelitian ini adalah desa-desa di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di Kecamatan Pulau Burung. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Sampel yang dipilih adalah tiga desa yang dianggap representatif, yaitu Desa Pulauburung (status Mandiri), Desa Teluknibung (status Mandiri), dan Desa Sungaidanai (status Berkembang). Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan kerentanan wilayah sebagai kawasan pesisir yang relevan untuk studi keberlanjutan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi. Data dikumpulkan dari basis data resmi yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2016). Rincian data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:
Data status dan skor Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024.
Data skor capaian SDGs Desa tahun 2024 untuk indikator prioritas: SDG 6 (Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi), SDG 11 (Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman), dan SDG 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim).

### Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan data sekunder dari Kemendesa PDTT. Definisi operasional dari variabel utama adalah sebagai berikut:
1. Indeks Desa Membangun (IDM): Diukur sebagai indeks komposit yang menilai kemajuan dan kemandirian desa, yang terdiri dari tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Skor IDM diklasifikasikan menjadi status Berkembang dan Mandiri untuk sampel dalam penelitian ini.
2. SDG 6 (Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi): Diukur berdasarkan skor capaian indikator yang menilai akses rumah tangga terhadap air minum layak dan fasilitas sanitasi yang memadai di tingkat desa.
3. SDG 11 (Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman): Diukur berdasarkan skor capaian indikator yang berkaitan dengan kualitas pemukiman, termasuk aspek kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di tingkat desa.

4. SDG 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim): Diukur berdasarkan skor capaian indikator yang menilai upaya desa dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk tingkat kesiapsiagaan terhadap bencana alam yang terkait dengan iklim

**Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tabulasi Data: Mengorganisir data kuantitatif ke dalam format tabel untuk membandingkan skor IDM dan skor SDGs pada setiap desa sampel.
2. Visualisasi Data: Menyajikan data yang telah ditabulasi ke dalam bentuk visual, seperti diagram proporsi dan grafik tren, untuk mempermudah identifikasi pola dan kesenjangan antar variabel.
3. Interpretasi Komparatif: Melakukan interpretasi terhadap hasil perbandingan data untuk menjelaskan secara mendalam fenomena paradoks pembangunan, serta mengaitkan temuan dengan konteks penelitian dan teori yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di Kecamatan Pulau Burung menunjukkan adanya paradoks pembangunan, di mana capaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang tinggi (Kementerian Desa, 2016) tidak selaras dengan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam SDGs Desa. Secara kuantitatif, desa-desa di wilayah ini menunjukkan kemajuan signifikan berdasarkan klasifikasi IDM, dengan dua desa (Pulau Burung dan Teluk Nibung) berhasil meraih status Mandiri dan satu desa (Sungai Danai) berstatus Berkembang. Namun, kemajuan ini menjadi kontras ketika dianalisis lebih mendalam melalui lensa SDGs Desa, yang menyingkap adanya kelemahan pada pilar keberlanjutan lingkungan. Secara spesifik, ditemukan tantangan pada pencapaian SDGs 6 terkait akses air bersih dan sanitasi layak, SDGs 11 mengenai kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta SDGs 13 yang berfokus pada penanganan perubahan iklim. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa IDM sebagai instrumen makro belum sepenuhnya mampu menangkap kerentanan ekologis dan sosial desa pesisir. Temuan ini konsisten dan diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh (Taryono, 2024) di Kabupaten Bengkalis, yang juga mengidentifikasi pola serupa di mana desa berstatus IDM Mandiri masih tertinggal dalam pencapaian indikator SDGs, khususnya pada aspek lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.

Untuk mengilustrasikan kesenjangan antara status IDM dan capaian SDGs secara kuantitatif, berikut disajikan data skor capaian untuk tiga tujuan SDGs prioritas di tiga desa sampel Kecamatan Pulau Burung. Data ini menunjukkan variasi kinerja yang signifikan antar desa, bahkan pada desa dengan status IDM yang sama.

**Tabel 1. Skor Capaian SDGs Prioritas (SDG 6, 11, dan 13) di Tiga Desa Sampel Kecamatan Pulau Burung Tahun 2024**

| | Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi | Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman | Desa Tanggap Perubahan Iklim |
|---|---|---|---|
| Pulau burung | 51,77 | 34,92 | 6,38 |
| Sungai danai | 50 | 66,67 | 0 |
| Teluk nibung | 39,51 | 63,98 | 0 |

Sumber : Data Kemendesa SDG's, 2024

Analisis kuantitatif terhadap data capaian SDGs di Kecamatan Pulau Burung secara detail memperlihatkan adanya diskoneksi yang signifikan antara status Indeks Desa Membangun (IDM) dengan kinerja pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya.

**Analisis Kinerja Kawasan Pemukiman Desa (SGD 11)**

Paradoks ini paling jelas terlihat pada SDG 11 (Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman), di mana Desa Sungaidanai yang berstatus Berkembang justru mencatatkan skor tertinggi (66,67), secara signifikan mengungguli Desa Pulauburung yang berstatus Mandiri dengan skor hanya 34,92. Lebih lanjut, inkonsistensi juga tampak di antara desa berstatus Mandiri itu sendiri; pada indikator yang sama, Desa Teluknibung mencapai skor 63,98, menunjukkan bahwa label "Mandiri" tidak menjamin tingkat capaian yang seragam.

**Analisis Kinerja Ketanggapan Perubahan Iklim (SDG 13)**

Kelemahan paling kritis dan merata teridentifikasi pada SDG 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim), di mana Desa Sungaidanai dan

Teluknibung mencatatkan skor 0, sementara Desa Pulauburung hanya 6,38, mengindikasikan bahwa ketahanan iklim merupakan isu yang terabaikan di seluruh desa pesisir terlepas dari status IDM mereka. Temuan kuantitatif ini memberikan bukti empiris yang kuat untuk mendukung argumen yang sejalan dengan penelitian Taryono (2024), yang juga menemukan adanya kesenjangan serupa di desa pesisir lain, di mana capaian makro IDM sering kali menutupi kelemahan fundamental pada pilar-pilar keberlanjutan.

**Proporsi Status Pembangunan Makro (IDM)**

Untuk melengkapi analisis pada level desa, data berikut menyajikan gambaran umum mengenai proporsi status pembangunan di Kecamatan Pulau Burung secara keseluruhan berdasarkan klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024. Visualisasi ini memberikan perspektif makro terhadap tingkat kemajuan desa di wilayah penelitian.

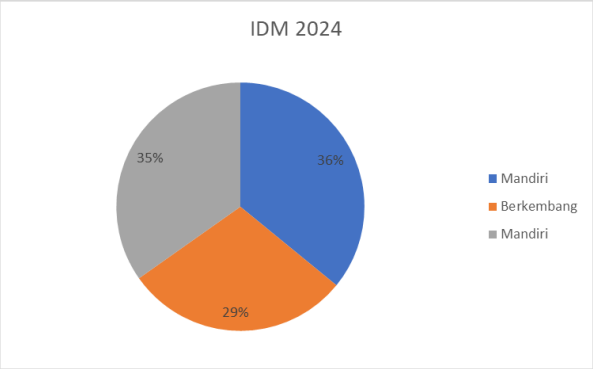


**Gambar 1. Proporsi Status Desa di Kecamatan Pulau Burung Berdasarkan Klasifikasi IDM Tahun 2024**
Sumber: Data IDM 2024

Analisis kuantitatif terhadap data proporsi status desa menunjukkan bahwa Kecamatan Pulau Burung memiliki komposisi pembangunan yang terbagi menjadi tiga kelompok besar. Temuan paling signifikan adalah terpecahnya status Mandiri menjadi dua segmen yang hampir sama besar (36% dan 35%), sementara sisanya adalah desa Berkembang (29%). Fragmentasi pada kategori Mandiri ini secara visual mengindikasikan bahwa status pembangunan tertinggi menurut IDM ternyata tidak seragam. Hal ini justru memperkuat argumen utama penelitian, karena menyiratkan adanya variasi dan karakteristik yang berbeda di antara desa-desa yang secara formal memiliki label "Mandiri". Kondisi ini sejalan dengan temuan pada level mikro, di mana kinerja antar desa Mandiri pada indikator SDGs terbukti sangat beragam. Dengan demikian, data proporsi ini ketika tidak digabungkan secara efektif menunjukkan bagaimana klasifikasi tunggal IDM dapat menutupi kompleksitas dan keragaman kondisi di lapangan, sekaligus menegaskan perlunya analisis yang lebih mendalam untuk memahami tantangan keberlanjutan yang sesungguhnya.

**Visualisasi Diskoneksi Tren IDM dan SDGs**

Untuk memvisualisasikan secara langsung diskoneksi antara Indeks Desa Membangun (IDM) dan capaian SDGs, data tren berikut menyajikan perbandingan antara skor agregat IDM 2024 dengan skor pada tiga indikator SDGs prioritas untuk masing-masing desa. Grafik ini secara efektif menyoroti bagaimana tren capaian makro (IDM) dapat bergerak ke arah yang berlawanan dengan tren capaian mikro (SDGs) di tingkat desa.

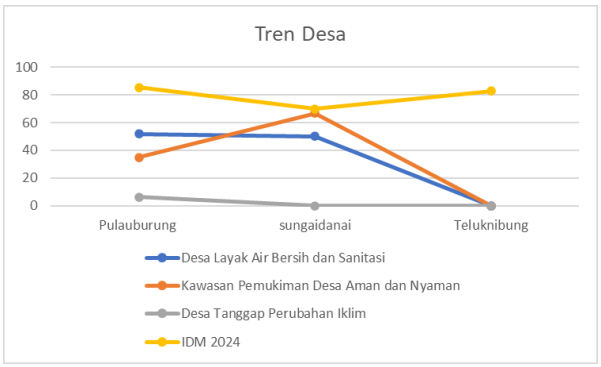


**Gambar 2. Grafik Perbandingan Tren Skor Agregat IDM dengan Skor Indikator SDGs Prioritas (6, 11, 13) di Desa Sampel Tahun 2024**
Sumber: Olah data dari Grafik Tren Desa, 2024

Analisis terhadap grafik tren desa memberikan bukti visual yang paling kuat mengenai paradoks pembangunan di Kecamatan Pulau Burung. Garis tren untuk IDM 2024 (kuning) secara konsisten berada pada level yang sangat tinggi untuk Desa Pulauburung (skor ~86) dan Teluknibung (skor ~83), yang melukiskan gambaran desa yang sudah sangat maju dan mandiri. Namun, gambaran ini berbanding

terbalik secara drastis dengan garis tren untuk indikator SDGs.

**Analisis Kinerja Air Bersih dan Sanitasi (SDG 6)**

Kasus paling ekstrem adalah Desa Teluknibung, yang meskipun memiliki skor IDM sangat tinggi, menunjukkan skor nol pada ketiga indikator SDGs yang diukur: air bersih dan sanitasi, pemukiman aman, dan tanggap perubahan iklim. Hal ini mengindikasikan bahwa sebuah desa bisa diklasifikasikan sebagai desa maju oleh IDM, meskipun memiliki kerentanan fundamental pada aspek keberlanjutan. Selain itu, grafik ini juga menyoroti anomali pada Desa Sungaidanai, yang memiliki skor IDM terendah namun justru mencapai puncak tertinggi pada indikator Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman (skor ~67). Visualisasi ini secara meyakinkan menyimpulkan bahwa IDM sebagai sebuah indeks komposit menyembunyikan volatilitas dan kelemahan kritis di level sektoral, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya proksi untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan.

Secara keseluruhan, analisis data skor individual, proporsi agregat, dan tren visual secara konsisten menunjukkan adanya diskoneksi fundamental antara status kemandirian yang diukur oleh IDM dengan realitas ketahanan berkelanjutan yang diungkap oleh kerangka SDGs. Ketergantungan pada IDM sebagai tolok ukur tunggal terbukti berisiko menciptakan rasa aman yang keliru (a false sense of security), karena capaian makro yang tinggi ternyata menutupi kerentanan kritis dalam aspek sanitasi, kesiapsiagaan bencana, dan terutama adaptasi iklim yang vital bagi desa pesisir. Dengan demikian, temuan-temuan ini secara kolektif menegaskan kembali argumen utama penelitian bahwa untuk mencapai pembangunan yang sejati, evaluasi desa harus melampaui sekadar label klasifikasi dan beralih ke pengukuran yang lebih granular dan berorientasi pada keberlanjutan. Temuan ini menjadi landasan kuat untuk merumuskan simpulan serta rekomendasi kebijakan pada bagian selanjutnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang komprehensif, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat diskoneksi fundamental antara status kemajuan desa yang diukur oleh Indeks Desa Membangun (IDM) dengan realitas pembangunan berkelanjutan yang direfleksikan oleh kerangka SDGs di Kecamatan Pulau Burung. Meskipun data IDM menunjukkan gambaran makro yang positif dengan dua desa berstatus Mandiri dan satu desa Berkembang, analisis yang lebih dalam pada level indikator SDGs menyingkap adanya paradoks pembangunan. Secara spesifik, desa dengan status IDM yang lebih rendah terbukti mampu mengungguli desa berstatus Mandiri pada indikator krusial seperti Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman (SDG 11), dan bahkan sebuah desa Mandiri dapat memiliki skor nol pada tiga pilar keberlanjutan (SDGs 6, 11, dan 13) meskipun skor IDM-nya tinggi. Kelemahan paling kritis dan merata teridentifikasi pada aspek Desa Tanggap Perubahan Iklim (SDG 13), yang menegaskan bahwa isu ketahanan iklim merupakan tantangan utama yang terabaikan di seluruh desa pesisir. Temuan ini, yang konsisten dengan penelitian (Taryono, 2024), secara meyakinkan membuktikan bahwa IDM sebagai indeks komposit tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya proksi keberhasilan pembangunan karena cenderung menutupi kerentanan ekologis dan sosial yang vital bagi keberlanjutan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Basri, M., Yulianto, Y., & Prihantika, I. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 15–24. https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.26

Elena, M., Ph, M., Engineering, A. A., D, D. G. P., Engineering, A. A., & Mancinelli, C. (2020). European farmers and participatory rural appraisal : A systematic literature review on experiences to optimize rural development. 60(2017), 1–11.

Fallahiyah, S. A. D., Sawiji, A., & Noverma. (2023). Pemetaan Tingkat Kerentanan Wilayah Pesisir Terhadap Perubahan Iklim di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Jurnal Kelautan Nasional, 18(2), 127. https://doi.org/10.15578/jkn.v18i2.10246

Kementerian Desa. (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Indeks Desa Membangun. Jakarta, 1–65. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016

Mangara, T. H., & Syaifudin, R. (2022). Sosialisasi Indeks Desa Membangun Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa Bungurcopong. Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS), 57–61.

Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).

Sembiring, M. P., Heltina, D., Irianty, R. S., Fermi, M. I., Yolanda, Y., & Suhendri. (2025). Peningkatan Ketahanan Lingkungan Desa Batu Belah Melalui Penanaman Artocarpus integer sebagai Pencegah Banjir. BATOBO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 03(01), 31–39.

Kuantitatif, P. P. (2016). Metode penelitian kunatitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.

Taryono (2024). Integrating SDGs into Sustainable Development in the Coastal Areas of Sumatra Island: A Case Study in Bengkalis Regency. International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities, 2(2), 203–215.

*idm.kemendesa.go.id. (n.d.). SDGs Desa. 2024. Retrieved September 17, 2025, from https://idm.kemendesa.go.id/ Retrieved September 17, 2025, from https://sid.kemendesa.go.id/sdgs*